

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009-2020

5.1.1 Perkembangan Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Menurut Suparmoko (2002) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu pertama sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai alat untuk mengatur alokasi dan distribusi suatu kegiatan ekonomi dalam satu daerah atau wilayah tertentu. Jadi secara umum pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melihat perkembangan pajak daerah di Provinsi Jambi dari tahun 2009-2020 dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1. Perkembangan Pajak daerah Provinsi Jambi tahun 2009-2020

Tahun	Pajak daerah (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2009	438.533.680.183	-
2010	602.355.302.089	37,36
2011	838.851.529.199	39,26
2012	808.258.511.161	-3,65
2013	841.884.751.200	4,16
2014	1.010.560.585.180	20,04
2015	1.010.318.979.969	-0,02
2016	966.519.347.102	-4,34
2017	1.316.162.467.485	36,18
2018	1.374.289.409.975	4,42
2019	1.345.106.684.308	-2,12
2020	1.292.729.408.514	-3,89
Rata-rata		11,58

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan dari tabel 5.1 terlihat perkembangan pajak daerah di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dengan rata-rata perkembangan pajak daerah di Provinsi Jambi dari tahun 2009-2020 adalah sebesar 11,58 persen. perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 39,26 persen atau meningkat dari Rp. 602.355.302.089 pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp. 838.851.529.199, hal ini terjadi dikarenakan peningkatan dari pajak kendaraan bermotor sebesar 33.76 persen. sedangkan perkembangan yang terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar -4,33 persen atau menurun dari Rp.1.010.560.585.180 pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar Rp.1.010.318.979.969 pada tahun 2015, hal ini terjadi dikarenakan penurunan kontribusi dari pajak kendaraan bermotor sebesar 31.85 persen dan pajak bea balik nama kendaraan sebesar 26.75 persen. Penurunan penerimaan pajak seharusnya

dapat diatasi dengan beberapa kebijakan-kebijakan dari pemerintah salah satunya pemutihan pajak.

5.1.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2000). Adapun sumber pendapatan asli daerah (PAD) dapat dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu : (1) Pajak daerah. (2) Retribusi daerah. (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah. (4) Lain-lain pendapatan asli daerah. Untuk melihat perkembangan pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi dari tahun 2009-2020 dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2. Pendapatan asli daerah Provinsi Jambi tahun 2009-2020

Tahun	PAD (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2009	526.442.077.650	-
2010	686.629.362.314	30,43
2011	984.232.579.912	43,34
2012	995.202.289.115	1,11
2013	997.893.262.073	0,27
2014	1.281.239.472.808	28,39
2015	1.241.223.028.011	-3,12
2016	1.233.514.664.109	-0,62
2017	1.580.304.867.342	28,11
2018	1.657.078.868.263	4,86
2019	1.651.089.944.335	-0,36
2020	1.535.183.487.238	-7,02
Rata-rata		11,40

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan dari tabel 5.2 terlihat perkembangan pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dengan rata-rata perkembangan sebesar 11,40 persen. perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 43,34 persen

atau meningkat dari Rp. 686.629.362.314 pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp. 984.232.579.912. Sedangkan perkembangan yang terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar -3,12 persen atau menurun dari Rp. 1.281.239.472.808 pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar Rp. 1.241.223.028.011 pada tahun 2015.

5.2. Jenis Pajak Daerah Potensial di Provinsi Jambi

5.2.1. Model Kontribusi

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak dari pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Antara lain : (1) Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama, (2) Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya, (3) Tarif PKB alat berat dan alat-alat besar, (4) Tarif PKB untuk angkutan umum, ambulans, pemadaman kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, Pemerintah Daerah. Untuk melihat kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini :

Tabel 5.3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi Tahun 2009-2020

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor (Rupiah)	Pajak Daerah (Rupiah)	Kontribusi (%)
2009	172.052.911.455	438.533.680.183	39,23
2010	203.355.568.273	602.355.302.089	33,76
2011	257.250.390.702	838.851.529.199	30,67
2012	274.997.858.908	808.258.511.161	34,02
2013	299.115.576.871	841.884.751.200	35,53
2014	318.466.618.198	1.010.560.585.180	31,51
2015	321.804.013.917	1.010.318.979.969	31,85
2016	339.443.747.598	966.519.347.102	35,12
2017	416.706.232.791	1.316.162.467.485	31,66
2018	442.780.609.762	1.374.289.409.975	32,22
2019	457.833.100.300	1.345.106.684.308	34,04
2020	465.129.288.875	1.292.729.408.514	35,98
	Rata-rata		33,80

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel 5.3. diatas rata-rata kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap total pajak daerah Provinsi Jambi dari tahun 2009 -2020 adalah sebesar 33,80 persen pertahun. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap total pajak daerah Provinsi Jambi yang tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 39,23 persen, kontribusi terbesar kedua pajak kendaraan bermotor terhadap total pajak daerah Provinsi Jambi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 35,98 persen. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap total pajak daerah Provinsi Jambi yang paling terkecil terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 30,67 persen. Pajak kendaraan bermotor terhadap total pajak daerah Provinsi Jambi terkecil kedua terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 31,51 persen.

2. Pajak Bea balik nama kendaraan bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha jadi objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan subyek pajak atau wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Antara lain : (1) Penyerahan pertama, (2) Penyerahan kedua dan seterusnya, (3) Penyerahan pertama alat-alat berat dan alat alat besar, (4) Penyerahan kedua dan seterusnya alat-alat berat dan alat-alat besar. Untuk melihat kontribusi pajak bea balik nama kendaraan terhadap pajak daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 5.4 dibawah ini :

Tabel 5.4. Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2020

Tahun	Pajak Bea Balik Nama (Rupiah)	Pajak Daerah (Rupiah)	Kontribusi (%)
2009	142.862.392.850	438.533.680.183	32,58
2010	257.348.835.580	602.355.302.089	42,72
2011	396.544.939.977	838.851.529.199	47,27
2012	330.686.924.900	808.258.511.161	40,91
2013	301.258.119.575	841.884.751.200	35,78
2014	316.823.957.130	1.010.560.585.180	31,35
2015	270.301.438.650	1.010.318.979.969	26,75
2016	243.963.112.550	966.519.347.102	25,24
2017	329.507.745.800	1.316.162.467.485	25,04
2018	340.541.089.076	1.374.289.409.975	24,78
2019	374.030.159.175	1.345.106.684.308	27,81
2020	253.462.168.400	1.292.729.408.514	19,61
	Rata-rata		31,65

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel 5.4. diatas Kontribusi pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap total pajak daerah Provinsi Jambi yang tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 47,27 persen, kontribusi terbesar kedua pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap total pajak daerah Provinsi Jambi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 42,72 persen. Kontribusi pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap total pajak daerah Provinsi Jambi yang paling terkecil terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 19,61 persen. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap total pajak daerah Provinsi Jambi terkecil kedua terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 24,78 persen. Rata-rata kontribusi pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap total pajak daerah Provinsi Jambi dari tahun 2009 - 2020 adalah sebesar 31,65 persen pertahun.

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan terhadap penggunaan bahan bakar (bensin, solar, dan gas) untuk menggerakkan kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Subjek pajak yaitu konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Untuk melihat kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pajak daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 5.5 dibawah ini :

Tabel 5.5. Kontribusi Pajak Bahan Bakar di Provinsi Jambi Tahun 2009-2020

Tahun	Pajak Bahan Bakar (Rupiah)	Pajak Daerah (Rupiah)	Kontribusi (%)
2009	122.796.652.892	438.533.680.183	28,00
2010	140.663.454.585	602.355.302.089	23,35
2011	183.844.593.314	838.851.529.199	21,92
2012	201.536.633.029	808.258.511.161	24,93
2013	240.371.585.823	841.884.751.200	28,55
2014	275.881.206.722	1.010.560.585.180	27,30
2015	282.231.184.400	1.010.318.979.969	27,93
2016	249.250.031.331	966.519.347.102	25,79
2017	300.364.910.839	1.316.162.467.485	22,82
2018	315.076.548.973	1.374.289.409.975	22,93
2019	315.579.366.913	1.345.106.684.308	23,46
2020	329.680.392.517	1.292.729.408.514	25,50
Rata-rata			25,21

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel 5.5. diatas Kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap total pajak daerah Provinsi Jambi yang tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 28,55 persen, kontribusi terbesar kedua pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap total pajak daerah Provinsi Jambi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 28,00 persen. Kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap total pajak daerah Provinsi Jambi yang paling terkecil terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 21,92 persen. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap total pajak daerah Provinsi Jambi terkecil kedua terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 22,82 persen. Rata-rata kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap total pajak daerah Provinsi Jambi dari tahun 2009 -2020 adalah sebesar 25,21 persen pertahun.

4. Pajak Air Permukaan

Objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan dan/atau pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Untuk melihat kontribusi pajak air permukaan terhadap pajak daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 5.6 dibawah ini :

Tabel 5.6. Kontribusi Pajak Air Permukaan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2020

Tahun	Pajak Air Permukaan (Rupiah)	Pajak Daerah (Rupiah)	Kontribusi (%)
2009	693.596.131	438.533.680.183	0,16
2010	871.720.781	602.355.302.089	0,14
2011	1.142.006.806	838.851.529.199	0,14
2012	1.037.536.633	808.258.511.161	0,13
2013	1.139.468.931	841.884.751.200	0,14
2014	1.191.753.673	1.010.560.585.180	0,12
2015	1.209.826.550	1.010.318.979.969	0,12
2016	1.193.160.472	966.519.347.102	0,12
2017	1.227.053.782	1.316.162.467.485	0,09
2018	1.566.534.879	1.374.289.409.975	0,11
2019	1.503.017.937	1.345.106.684.308	0,11
2020	1.399.932.053	1.292.729.408.514	0,11
Rata-rata			0,12

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel 5.6. diatas Kontribusi pajak air permukaan terhadap total pajak daerah Provinsi Jambi yang tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 0,16 persen. Kontribusi pajak air permukaan terhadap total pajak daerah Provinsi Jambi yang paling terkecil terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,09 persen. Rata-

rata kontribusi pajak air permukaan terhadap total pajak daerah Provinsi Jambi dari tahun 2009 -2020 adalah sebesar 0,12 persen pertahun.

5.2.2. Model Pertumbuhan

Pada model pertumbuhan ini akan melihat perkembangan dari tiap pajak daerah yang ada di Provinsi Jambi yang pertama dilihat adalah pertumbuhan dari pajak kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Jambi

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 5.7. Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jambi tahun 2009-2020

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor (Rupiah)	Perkembangan (%)
2009	172.052.911.455	-
2010	203.355.568.273	18,19
2011	257.250.390.702	26,50
2012	274.997.858.908	6,90
2013	299.115.576.871	8,77
2014	318.466.618.198	6,47
2015	321.804.013.917	1,05
2016	339.443.747.598	5,48
2017	416.706.232.791	22,76
2018	442.780.609.762	6,26
2019	457.833.100.300	3,40
2020	465.129.288.875	1,59
Rata-rata		9,76

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan dari tabel terlihat perkembangan pajak kendaraan bermotor di di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dengan rata-rata perkembangan sebesar 9,76 persen. Perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 26,50 persen atau meningkat dari Rp. 203.355.568.273 pada tahun 2010 meningkat menjadi

sebesar Rp. 257.250.390.702, hal ini terjadi dikarenakan peningkatan dari pembelian kendaraan bermotor diiringi dengan adanya kebijakan dari Pemerintah yaitu pemutihan pajak atau penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak. Sedangkan perkembangan yang terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,05 persen atau meningkat dari Rp. 318.466.618.198 pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp 321.804.013.917 pada tahun 2015. Rendahnya perkembangan pada tahun tersebut menunjukkan menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Pajak Bea balik nama kendaraan bermotor

Pada model pertumbuhan ini akan melihat perkembangan dari pajak daerah yang ada di Provinsi Jambi yaitu pertumbuhan dari pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Jambi.

Tabel 5.8. Pertumbuhan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jambi tahun 2009-2020

Tahun	Pajak Bea Balik Nama (Rupiah)	Perkembangan (%)
2009	142.862.392.850	-
2010	257.348.835.580	80,14
2011	396.544.939.977	54,09
2012	330.686.924.900	-16,61
2013	301.258.119.575	-8,90
2014	316.823.957.130	5,17
2015	270.301.438.650	-14,68
2016	243.963.112.550	-9,74
2017	329.507.745.800	35,06
2018	340.541.089.076	3,35
2019	374.030.159.175	9,83
2020	253.462.168.400	-32,23
Rata-rata		9,59

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan dari tabel terlihat pajak bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dengan rata-rata perkembangan sebesar 9,59 persen. Perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 80,14 persen atau meningkat dari Rp.142.862.392.850 pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar Rp. 257.348.835.580. Sedangkan perkembangan yang terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar -16,61 persen atau menurun dari Rp. 396.544.939.977 pada tahun 2011 menurun menjadi menjadi sebesar Rp 330.686.924.900 pada tahun 2012, hal ini dikarenakan banyak kendaraan pribadi yang digunakan di Provinsi Jambi belum balik nama atas nama kendaraan pribadinya sendiri.

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Pertumbuhan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor pajak yang dikenakan terhadap penggunaan bahan bakar (bensin, solar, dan gas) untuk menggerakkan kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air yang ada di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.9. Pertumbuhan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Jambi tahun 2009-2020

Tahun	Pajak Bahan Bakar (Rupiah)	Perkembangan (%)
2009	122.796.652.892	-
2010	140.663.454.585	14,55
2011	183.844.593.314	30,70
2012	201.536.633.029	9,62
2013	240.371.585.823	19,27
2014	275.881.206.722	14,77
2015	282.231.184.400	2,30
2016	249.250.031.331	-11,69
2017	300.364.910.839	20,51
2018	315.076.548.973	4,90
2019	315.579.366.913	0,16
2020	329.680.392.517	4,47
	Rata-rata	9,96

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan dari tabel terlihat pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dengan rata-rata perkembangan sebesar 9,96. Perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 30,69 persen. Sedangkan perkembangan yang terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar - 11,68 persen.

4. Pajak Air Permukaan

Untuk melihat perkembangan dari air permukaan yang ada di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.10. Pertumbuhan Air Permukaan Provinsi Jambi tahun 2009-2020

Tahun	Pajak Air Permukaan	Perkembangan (%)
2009	693.596.131	-
2010	871.720.781	25,68
2011	1.142.006.806	31,01
2012	1.037.536.633	-9,15
2013	1.139.468.931	9,82
2014	1.191.753.673	4,59
2015	1.209.826.550	1,52
2016	1.193.160.472	-1,38
2017	1.227.053.782	2,84
2018	1.566.534.879	27,67
2019	1.503.017.937	-4,05
2020	1.399.932.053	-6,86
Rata-rata		7,43

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan dari tabel terlihat pajak air permukaan di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi. perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 31,00 persen. Sedangkan perkembangan yang terendah terjadi pada tahun 2012

yaitu sebesar -9,15 persen. Rata-rata perkembangan pajak air permukaan di Provinsi Jambi dari tahun 2009-2020 adalah sebesar 7,43 persen.

5.2.3. Model Elastisitas

Untuk mengetahui elastisitas penerimaan Pajak kendaraan bermotor terhadap PDRB selama tahun 2009-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.11. Elastisitas Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PDRB Provinsi Jambi tahun 2009-2020

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor (Rupiah)	PDRB (Rupiah)	Elastisitas	Kriteria
2009	172.052.911.455	84.414.980.000.000	-	
2010	203.355.568.273	90.618.410.000.000	2,48	Elastis
2011	257.250.390.702	97.740.870.000.000	3,37	Elastis
2012	274.997.858.908	104.615.080.000.000	0,98	Inelastis
2013	299.115.576.871	111.766.130.000.000	1,28	Elastis
2014	318.466.618.198	119.991.440.000.000	0,88	Inelastis
2015	321.804.013.917	125.037.400.000.000	0,25	Inelastis
2016	339.443.747.598	130.501.130.000.000	1,25	Elastis
2017	416.706.232.791	136.502.710.000.000	4,95	Elastis
2018	442.780.609.762	142.902.000.000.000	1,33	Elastis
2019	457.833.100.300	149.142.590.000.000	0,78	Inelastis
2020	465.129.288.875	148.449.870.000.000	-3,43	Inelastis
Rata-rata			1,28	Elastis

Sumber : Data Diolah, 2021

Tabel 5.11 menunjukkan bahwa Elastisitas penerimaan Pajak kendaraan bermotor terhadap PDRB pada tahun 2012, 2014, 2015, 2019 dan 2020 lebih kecil dari 1 yang berarti bahwa pengaruh pertumbuhan PDRB kurang peka/inelastis terhadap pertumbuhan Pajak kendaraan bermotor. Elastisitas penerimaan Pajak kendaraan bermotor terhadap PDRB tahun 2010, 2011, 2013, 2016, 2017, dan 2018 menunjukkan nilai yang lebih besar dari 1 masing yang berarti bahwa pengaruh

pertumbuhan PDRB terhadap pertumbuhan Pajak kendaraan bermotor adalah Elastis. Jika dihitung dengan rata-rata maka besarnya angka Elastisitasnya yang diperoleh adalah 1,28, artinya selama 11 tahun apabila PDRB naik sebesar 1 persen akan mengakibatkan kenaikan Pajak kendaraan bermotor sebesar 1,28 persen atau bisa dikatakan elastis.

2. Pajak Bea balik nama kendaraan bermotor

Untuk mengetahui elastisitas penerimaan Pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap PDRB selama tahun 2009-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.12. Elastisitas Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap PDRB Provinsi Jambi tahun 2009-2020

Tahun	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Rupiah)	PDRB (Rupiah)	Elastisitas	Kriteria
2009	142.862.392.850	84.414.980.000.000	-	
2010	257.348.835.580	90.618.410.000.000	10,90	Elastis
2011	396.544.939.977	97.740.870.000.000	6,88	Elastis
2012	330.686.924.900	104.615.080.000.000	-2,36	Inelastis
2013	301.258.119.575	111.766.130.000.000	-1,30	Inelastis
2014	316.823.957.130	119.991.440.000.000	0,70	Inelastis
2015	270.301.438.650	125.037.400.000.000	-3,49	Inelastis
2016	243.963.112.550	130.501.130.000.000	-2,23	Inelastis
2017	329.507.745.800	136.502.710.000.000	7,62	Elastis
2018	340.541.089.076	142.902.000.000.000	0,71	Inelastis
2019	374.030.159.175	149.142.590.000.000	2,25	Elastis
2020	253.462.168.400	148.449.870.000.000	69,40	Elastis
Rata-rata			8,10	Elastis

Sumber : Data Diolah, 2021

Tabel 5.12 menunjukkan bahwa elastisitas penerimaan Pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap PDRB pada tahun 2012, 2013, 2014, 2016, dan 2018 lebih kecil dari 1 yang berarti bahwa pengaruh pertumbuhan PDRB kurang

peka/inelastis terhadap pertumbuhan Pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Elastisitas penerimaan Pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap PDRB tahun 2010 2011, 2017, 2019 dan 2020 menunjukkan nilai yang lebih besar dari 1 masing yang berarti bahwa pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap pertumbuhan Pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah Elastis. Jika dihitung dengan rata-rata maka besarnya angka elastisitasnya yang diperoleh adalah 8,10, artinya selama 11 tahun apabila PDRB naik sebesar 1 persen akan mengakibatkan kenaikan Pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 8,10 persen atau bisa dikatakan elastis.

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Untuk mengetahui elastisitas penerimaan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap PDRB selama tahun 2009-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.13. Elastisitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap PDRB Provinsi Jambi tahun 2009-2020

Tahun	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Rupiah)	PDRB (Rupiah)	Elastisitas	Kriteria
2009	122.796.652.892	84.414.980.000.000	-	
2010	140.663.454.585	90.618.410.000.000	1,98	Elastis
2011	183.844.593.314	97.740.870.000.000	3,91	Elastis
2012	201.536.633.029	104.615.080.000.000	1,37	Elastis
2013	240.371.585.823	111.766.130.000.000	2,82	Elastis
2014	275.881.206.722	119.991.440.000.000	2,01	Elastis
2015	282.231.184.400	125.037.400.000.000	0,55	Inelastis
2016	249.250.031.331	130.501.130.000.000	-2,67	Inelastis
2017	300.364.910.839	136.502.710.000.000	4,46	Elastis
2018	315.076.548.973	142.902.000.000.000	1,04	Elastis
2019	315.579.366.913	149.142.590.000.000	0,04	Inelastis
2020	329.680.392.517	148.449.870.000.000	-9,62	Inelastis
Rata-rata			0,53	Inelastis

Sumber : Data Diolah, 2021

Tabel 5.13 menunjukkan bahwa Elastisitas penerimaan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap PDRB pada tahun 2015, 2016, 2019 dan 2020 lebih kecil dari 1 yang berarti bahwa pengaruh pertumbuhan PDRB kurang peka/inelastis terhadap pertumbuhan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Elastisitas penerimaan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap PDRB tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, dan 2018 menunjukkan nilai yang lebih besar dari 1 masing yang berarti bahwa pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap pertumbuhan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah Elastis. Jika dihitung dengan rata-rata maka besarnya angka Elastisitasnya yang diperoleh adalah 0,53, artinya selama 11 tahun apabila PDRB naik sebesar 1 persen akan mengakibatkan kenaikan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 0,53 persen atau bisa dikatakan inelastis.

4. Pajak Air Permukaan

Untuk mengetahui elastisitas penerimaan Pajak air permukaan terhadap PDRB selama tahun 2009-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.14. Elastisitas Pajak Air Permukaan Terhadap PDRB Provinsi Jambi tahun 2009-2020

Tahun	Pajak Air Permukaan (Rupiah)	PDRB (Rupiah)	Elastisitas	Kriteria
2009	693.596.131	84.414.980.000.000	-	
2010	871.720.781	90.618.410.000.000	3,49	Elastis
2011	1.142.006.806	97.740.870.000.000	3,94	Elastis
2012	1.037.536.633	104.615.080.000.000	-1,30	Inelastis
2013	1.139.468.931	111.766.130.000.000	1,44	Elastis
2014	1.191.753.673	119.991.440.000.000	0,62	Inelastis
2015	1.209.826.550	125.037.400.000.000	0,36	Inelastis
2016	1.193.160.472	130.501.130.000.000	-0,32	Inelastis
2017	1.227.053.782	136.502.710.000.000	0,62	Inelastis
2018	1.566.534.879	142.902.000.000.000	5,90	Elastis
2019	1.503.017.937	149.142.590.000.000	-0,93	Inelastis
2020	1.399.932.053	148.449.870.000.000	14,77	Elastis
Rata-rata			2,60	Elastis

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Tabel 5.14 menunjukkan bahwa Elastisitas penerimaan Pajak Air Permukaan terhadap PDRB pada tahun 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2019 lebih kecil dari 1 yang berarti bahwa pengaruh pertumbuhan PDRB kurang peka/inelastis terhadap pertumbuhan Pajak Air Permukaan. Elastisitas penerimaan Pajak Air Permukaan terhadap PDRB tahun 2010, 2011, 2013, 2018, dan 2020 menunjukkan nilai yang lebih besar dari 1 masing yang berarti bahwa pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap pertumbuhan Pajak Air Permukaan adalah Elastis. Jika dihitung dengan rata-rata maka besarnya angka Elastisitasnya yang diperoleh adalah 2,60, artinya selama 11 tahun apabila PDRB naik sebesar 1 persen akan mengakibatkan kenaikan Pajak Air Permukaan sebesar 2,6 persen atau bisa dikatakan inelastis.

Dari hasil perhitungan dari ketiga model yaitu model kontribusi, model pertumbuhan dan elastisitas maka ditarik kesimpulan pajak daerah yang potensial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.15. Potensi Pajak Daerah Provinsi Jambi

Pajak Daerah	Rata-Rata			Kesimpulan
	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)	Elastisitas	
Pajak Kendaraan Bermotor	33,80	9,76	1,28 Elastis	Potensial
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	31,65	9,59	8,10 Elastis	potensial
Pajak Bahan Bakar Bermotor	25,21	9,96	0,53 Inelastis	Tidak potensial
Pajak Air Permukaan	0,12	7,43	2,60 Elastis	Tidak potensial

Sumber : data diolah

Berdasarkan dari tabel diatas terlihat bahwa pajak daerah yang potensial untuk dikembangkan adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor, karena dari ketiga model perhitungan yang dilakukan model

kontribusi lebih besar dari pajak lainnya dan model pertumbuhan juga paling tertinggi dari pajak lainnya serta model elastisitas pajak kendaraan bermotor dan dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor termasuk dalam kategori elastis. Kemudian pajak bahan bakar bermotor tidak potensial karena kategori elastisitasnya adalah inelastis karena nilainya $0,53 < 1$. Sedangkan pajak air permukaan tidak potensial karena kontribusinya sangat rendah yaitu 0,12 persen.

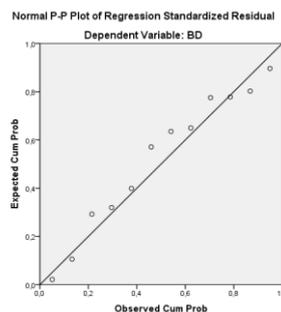
5.3 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jambi

5.3.1 Pengaruh Pajak Potensial Kendaraan Bermotor Terhadap Belanja Daerah

5.3.1.1 Pengujian Asumsi Klasik

Model yang dihasilkan sebelum digunakan untuk pengujian hipotesis, maka dilakukan pengujian dengan uji asumsi klasik untuk mendapatkan model yang “*blues*” atau “*best fit model*”.

Berdasarkan teori statistika model linier hanya residu dari variabel dependent Y yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel independen diasumsikan bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji normalitasnya. Uji normalitas dapat dilihat pada grafik Normal P-Plot sebagai berikut.



Gambar 5.1 Normalitas Data

Pada grafik P-Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis histogram menuju pola distribusi normal maka variabel dependen Y memenuhi asumsi normalitas.

5.3.1.2 Hasil Regresi Sederhana

Pada bagian ini akan dipresentasikan pengaruh pajak potensial kendaraan bermotor terhadap belanja daerah. Dengan menggunakan persamaan regresi sederhana dan menggunakan program SPSS 22. Sebagai variabel independen (bebas) adalah pajak potensial kendaraan bermotor sedangkan variabel dependent adalah Belanja Daerah. Dari persamaan regresi linear sederhana diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

Tabel 5.16. Regresi Sederhana Pajak Kendaraan Bermotor
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-786393790739,514	389439410430,776		-2,019	,071
PD	11,648	1,133	,956	10,282	,000

a. Dependent Variable: BD

Dari hasil regresi maka didapat hasil dan diinterpretasikan sebagai berikut ini :

$$BD = -786393790739,514 + 11,648PD$$

1. Nilai konstanta (α) sebesar -786393790739,514 hal ini berarti bahwa jika pajak kendaraan bermotor adalah konstan atau nol atau tidak berubah maka belanja daerah sebesar -786393790739,514 rupiah.
2. Koefisien pajak kendaraan bermotor sebesar 11,648, hal ini berarti setiap peningkatan pajak kendaraan bermotor sebesar 1 rupiah maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 11,648 rupiah dengan asumsi belanja

daerah dalam keadaan konstan atau tidak berubah, artinya semakin meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor maka akan meningkatkan pula belanja daerah, hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Afrianty (2014) yang mengatakan bahwa pajak daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

Dari hasil koefisien regresi maka model regresi dapat disederhanakan dan dilakukan uji t dan koefisien determinasi sebagai berikut :

1. Uji t

Untuk mengetahui variabel bebas pengaruhnya terhadap variabel terikat, uji t dilakukan dengan membandingkan nilai uji t hitung dengan t tabel. Hasil regresi menunjukkan nilai t hitung untuk variabel pajak daerah adalah sebesar 10,282 dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh t tabel sebesar 1,782 hasil regresi menunjukkan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka dalam hal ini (H_0) ditolak dan (H_a) diterima yang artinya pajak daerah potensial yaitu pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Jambi. Hasil ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan (2009), Handayani dan Elva (2012), dan Febriyanti (2017) yang menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah karena pajak merupakan bagian pendapatan asli daerah yang terbesar. Berpengaruhnya pajak kendaraan bermotor terhadap belanja daerah karena pajak kendaraan bermotor memiliki potensi yang besar. Jumlah kendaraan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan tentunya peningkatan jumlah kendaraan meningkatkan potensi pajak yang dapat digali oleh pemerintah daerah dan dialokasikan untuk belanja daerah.

2. Koefisien Determinasi

Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui nilai R^2 dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.17 Hasil Uji Determinan

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,956 ^a	,914	,905	367753497185,75550

a. Predictors: (Constant), PD

b. Dependent Variable: BD

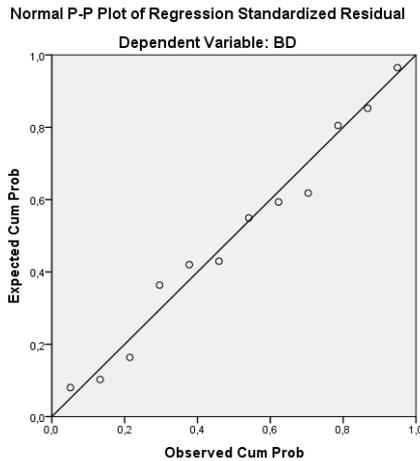
Hasil regresi dapat dilihat dari nilai R^2 sebesar 0,914 artinya 91,4 persen belanja daerah dipengaruhi oleh pajak kendaraan bermotor sedangkan sisanya sebesar 8,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Besarnya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor akan berkontribusi besar terhadap realisasi belanja daerah.

5.3.2 Pengaruh Pajak Potensial Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Belanja Daerah

5.3.2.1 Pengujian Asumsi Klasik

Model yang dihasilkan sebelum digunakan untuk pengujian hipotesis, maka dilakukan pengujian dengan uji asumsi klasik untuk mendapatkan model yang “*blues*” atau “*best fit model*”.

Berdasarkan teori statistika model linier hanya residu dari variabel dependent Y yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel independen diasumsikan bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji normalitasnya. Uji normalitas dapat dilihat pada grafik Normal P-Plot sebagai berikut.



Gambar 5.2 Normalitas Data

Pada grafik P-Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis histogram menuju pola distribusi normal maka variabel dependen Y memenuhi asumsi normalitas.

5.3.2.2 Hasil Regresi Sederhana

Pada bagian ini akan dipresentasikan pengaruh pajak potensial Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap belanja daerah. Dengan menggunakan persamaan regresi sederhana dan menggunakan program SPSS 22. Sebagai variabel independen (bebas) adalah pajak potensial Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sedangkan variabel dependent adalah Belanja Daerah. Dari persamaan regresi linear sederhana diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

Tabel 5.18. Regresi Sederhana Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1702434467178,352	661994232594,512		-2,572	,028
PD	16,086	2,181	,919	7,376	,000

a. Dependent Variable: BD

Dari hasil regresi maka didapat hasil dan diinterpretasikan sebagai berikut ini :

$$BD = -1702434467178,352 + 16,086PD$$

3. Nilai konstanta (α) sebesar -1702434467178,352 hal ini berarti bahwa jika pajak kendaraan bermotor adalah konstan atau nol atau tidak berubah maka belanja daerah sebesar -1702434467178,352 rupiah.
4. Koefisien Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 16,086, hal ini berarti setiap peningkatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 1 rupiah maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 16,086 rupiah dengan asumsi belanja daerah dalam keadaan konstan atau tidak berubah, artinya semakin meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor maka akan meningkatkan pula belanja daerah, hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Afrianty (2014) yang mengatakan bahwa pajak daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

Dari hasil koefisien regresi maka model regresi dapat disederhanakan dan dilakukan uji t dan koefisien determinasi sebagai berikut :

1. Uji t

Untuk mengetahui variabel bebas pengaruhnya terhadap variabel terikat, uji t dilakukan dengan membandingkan nilai uji t hitung dengan t tabel. Hasil regresi menunjukkan nilai t hitung untuk variabel pajak daerah adalah sebesar 7,376 dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh t tabel sebesar 1,782 hasil regresi menunjukkan t hitung > t tabel maka dalam hal ini (H_0) ditolak dan (H_a) diterima yang artinya pajak daerah potensial yaitu Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Jambi. Hasil ini

sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan (2009), Handayani dan Elva (2012), dan Febriyanti (2017) yang menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah karena pajak merupakan bagian pendapatan asli daerah yang terbesar. Berpengaruhnya Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap belanja daerah karena Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang besar. Banyaknya jual beli kendaraan bekas menjadi potensi pajak bagi pemerintah daerah dalam bentuk Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Koefisien Determinasi

Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui nilai R^2 dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.19 Hasil Uji Determinan

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,919 ^a	,845	,829	492951220419,79600

a. Predictors: (Constant), PD

b. Dependent Variable: BD

Hasil regresi dapat dilihat dari nilai R^2 sebesar 0,845 artinya 84,5 persen belanja daerah dipengaruhi oleh Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sedangkan sisanya sebesar 15,5 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Besarnya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor akan berkontribusi besar terhadap realisasi belanja daerah setelah Pajak Kendaraan Bermotor.

5.3.3 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pajak yang potensial di kembangkan di Provinsi Jambi adalah pajak kendaraan bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan begitu diharapkan untuk pemerintah untuk mengaktifkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka sebaiknya Samsat Provinsi Jambi perlu mendata ulang semua kendaraan bermotor yang masuk dalam kategori kena pajak, terus menjalankan Program dan Sosialisasi meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak di masyarakat serta meningkatkan kemampuan profesional petugas dalam melaksanakan tugas mereka sehingga diharapkan pemungutan pajak dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Selain itu program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor penting diadakan untuk menarik pembayaran pajak yang tertunda dari wajib pajak.

Meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di UPTD/Samsat dari semua unsur, sehingga untuk kedepannya akan tercapai penerimaan pajak kendaraan bermotor yang optimal dan sistim pelayanan yang memberikan kepuasan kepada wajib pajak.

Memperhatikan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang cukup besar kepada pemerintah daerah Provinsi Jambi diharapkan untuk dapat meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap tahunnya,

sehingga akan semakin meningkatkan sumber pendanaan untuk pembangunan daerah.

5.4 Analisis SWOT

Dalam Strategi peningkatan pajak potensial di penelitian ini maka menggunakan analisis swot. Analisis swot adalah sebuah analisis yang dicetuskan oleh Albert Humprey pada tahun 1960–1970-an. Analisis Swot merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal (dalam) yaitu *Strengths* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan) dan faktor eksternal (luar) yaitu, *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman).

5.4.1 Faktor Internal

Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya *strengths* dan *weaknesses* (S dan W). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan maupun organisasi, hal ini ikut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (*decision making*) perusahaan atau organisasi.

1. Strengths (Kekuataan)

Kekuatan adalah kompetensi khusus yang terdapat dalam Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, sehingga Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi memiliki keunggulan kompetitif. Hal ini disebabkan karena Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi memiliki kewenangan. Adapun kekuatan yang mendukung Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam meningkatkan pajak potensial yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah:

1. Adanya Peraturan Daerah & Perundang-undangan Pajak

Peraturan Daerah & Perundang-undangan Pajak memberikan kewenangan khusus bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan tentang pajak.

2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung petugas dalam memungut pajak.

3. Ketersediaan SDM / aparat pemungut pajak

Dengan adanya ketersediaan SDM atau petugas pajak untuk memungut pajak

4. Struktur organisasi telah tersusun berdasarkan Peraturan Daerah

Struktur organisasi yang tersusun dari jabatan tertinggi hingga terendah dan memiliki tupoksi sesuai perda.

2. Weakness (Kelemahan)

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan internal dalam hal sumber daya, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang bagi kinerja pemilik dan peningkatan pajak potensial, adapun kelemahan yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah :

1. Kurangnya SDM / pemungut yang profesional

Kurang profesionalnya SDM atau pemungut pajak menjadi masalah internal dalam Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

2. Kurang solidnya koordinasi instansi terkait

Masih kurang solidnya koordinasi antar pegawai di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

3. Kurang akuratnya data kendaraan

Banyak data potensi pajak yang tidak akurat, sehingga pemungutan pajak tidak maksimal.

4. Kurangnya sarana pendukung operasional

Kurang lengkapnya sarana pendukung seperti komputer dan kendaraan sarana lainnya yang dapat mendukung optimalnya pemungutan pajak.

5.4.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya *Opportunity* dan *Threats* (O dan T). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan dan organisasi yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan maupun organisasi.

1. *Opportunity* (Peluang)

Peluang adalah situasi dan kondisi yang berkembang di masa yang akan datang dan kondisi yang menguntungkan dari luar Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, adapun peluang yang dapat ditangkap oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah :

1. Situasi Provinsi cukup aman terkendali

Provinsi Jambi termasuk wilayah yang aman konflik dan kurangnya bencana alam.

2. Dukungan teknologi cukup memadai

Pemungutan pajak didukung dengan teknologi yang cukup memadai.

3. Berkembangnya kerjasama antar organisasi pemerintah

Berkembangnya kerjasama antar organisasi pemerintah seperti Bakeuda dengan Samsat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor.

4. Himbauan legislatif dan eksekutif kepada masyarakat agar patuh pajak

Adnya himbauan dari legislatif dan eksekutif kepada masyarakat agar patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor..

2. Ancaman (*Threats*)

Ancaman adalah situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan dari luar perusahaan maupun luar organisasi dan juga dapat mengganggu, Adapun yang menjadi ancaman bagi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah :

1. Krisis ekonomi yang berkepanjangan

Krisis ekonomi secara continuitas menyebabkan terhalangnya Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam mencapai target pajak.

2. Situasi wilayah yang belum kondusif

Terdapat beberapa wilayah di Provinsi Jambi dengan perekonomian yang tidak baik sehingga mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

3. Kesadaran atau pengetahuan wajib pajak

Kesadaran atau pengetahuan wajib pajak yang masih rendah.

4. Koordinasi antar instansi terkait kurang mantap

Kurang baiknya koordinasi dengan instansi lain yang terkait.

5.4.3 Hasil Evaluasi Faktor Internal (EFI)

Hasil evaluasi faktor internal ini didasarkan atas peringkat (rating) dan bobot yang diberikan oleh responden terhadap faktor – faktor internal yang telah ditentukan. Adapun hasil evaluasi faktor internal yang diberikan yaitu:

Tabel 5.20 Hasil Evaluasi Faktor Internal (EFI)

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
	Kekuatan (Strength)			
1	Adanya Peraturan Daerah & Perundang-undangan Pajak	0,25	4	1,00
2	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung	0,10	4	0,40
3	Ketersediaan SDM / Aparat pemungut pajak	0,15	4	0,60
4	Struktur organisasi telah tersusun berdasarkan Peraturan Daerah	0,10	3	0,30
	Total Skor Kekuatan (Strength)	0,60		2,30
	Kelemahan (Weakness)			
1	Kurangnya SDM / pemungut yang professional	0,15	1	0,15
2	Kurang solidnya koordinasi instansi terkait	0,05	2	0,10
3	Kurang akuratnya data kendaraan	0,10	2	0,20
4	Kurangnya sarana pendukung operasional	0,10	1	0,10
	Total Skor Kelemahan (Weakness)	0,40		0,55
	Total Kekuatan – Total Kelemahan	1,000		2,85

Sumber : Data Diolah, 2021

Keterangan : Total skor kekuatan (strength) : 2,30

Total skor kelemahan (weakness) : 0,55

5.4.4 Hasil Evaluasi Faktor Eksternal (EFE)

Hasil evaluasi faktor eksternal ini didasarkan atas peringkat (rating) dan bobot yang diberikan oleh responden terhadap faktor – faktor eksternal yang telah ditentukan. Adapun hasil evaluasi faktor eksternal yang diberikan yaitu :

Tabel 5.21 Hasil Evaluasi Faktor Eksternal (EFE)

No	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
	Peluang (Opportunity)			
1	Situasi Provinsi cukup aman terkendali	0,15	4	0,60
2	Dukungan teknologi cukup memadai	0,10	3	0,30
3	Berkembangnya kerjasama antar organisasi pemerintah	0,20	4	0,80
4	Himbauan legislatif dan eksekutif kepada masyarakat agar patuh pajak	0,20	4	0,80
	Total Skor Peluang (Opportunity)	0,65		2,50
	Ancaman (Threats)	Bobot	Rating	Bobot x Rating
1	Krisis ekonomi berkepanjangan	0,10	1	0,10
2	Situasi wilayah yang belum kondusif	0,05	1	0,10
3	Kesadaran atau pengetahuan wajib pajak	0,10	2	0,20
4	Koordinasi antar instansi terkait kurang mantap	0,10	2	0,20
	Total Skor Ancaman (Threats)	0,35		0,60
	Total Peluang – Total Ancaman	1,000		3,10

Sumber : Data Diolah, 2021

Keterangan : Total skor peluang (opportunity) : 2,50

Total skor ancaman (Threats) : 0,60

5.4.5 Matriks SWOT

Dengan tersusunnya hasil evaluasi faktor internal (EFI) dan hasil evaluasi faktor eksternal (EFE), maka dibuatlah rumusan matriks SWOT untuk menentukan strategi yang tepat dalam peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial di Provinsi Jambi. Adapun rumusan matriks SWOT berdasarkan hasil evaluasi faktor internal dan eksternal, yaitu :

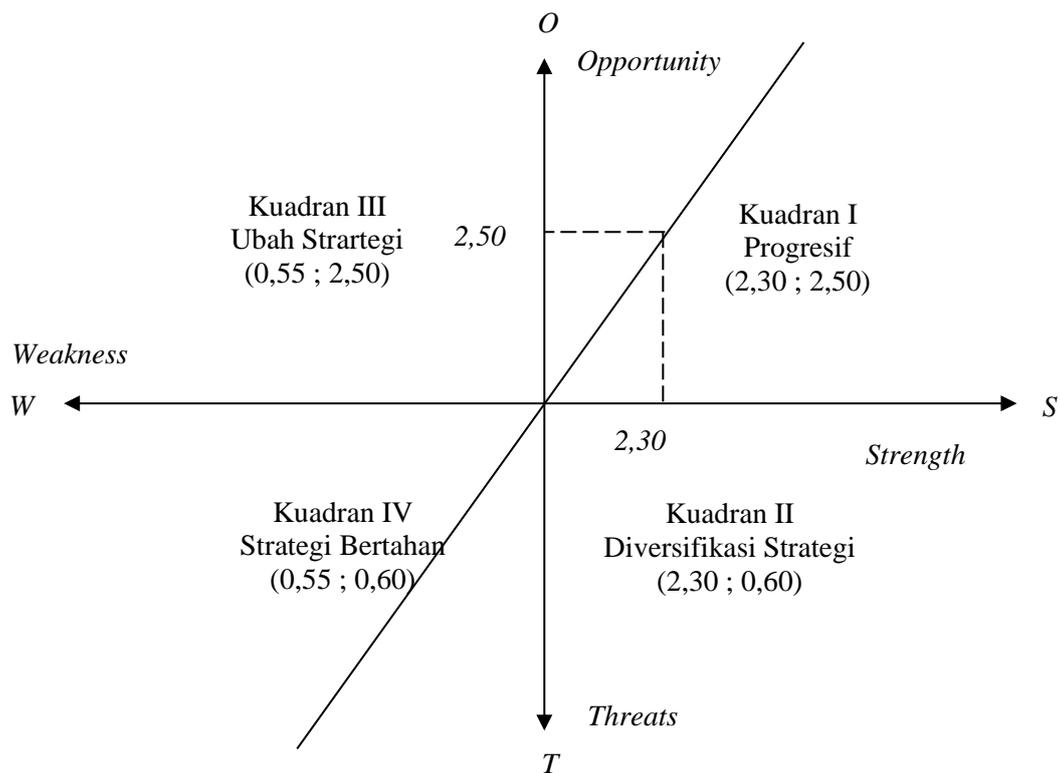
Tabel 5.22 Rumusan Matriks SWOT

EFI EFE	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	Strategi SO $SO = 2,30 + 2,50$ $SO = 4,80$	Startegi WO $WO = 0,55 + 2,50$ $WO = 3,05$
Ancaman (T)	Strategi ST $ST = 2,30 + 0,60$ $ST = 2,90$	Strategi WT $WT = 0,55 + 0,60$ $WT = 1,15$

Sumber : Data Diolah, 2021

Dari perhitungan matriks SWOT, maka diperoleh nilai tertinggi adalah SO sebesar 4,80. Dengan demikian nilai yang tertinggi merupakan strategi yang cocok dalam peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial di Provinsi Jambi. Dimana strategi SO yaitu dengan mengoptimalkan kekuatan dan memaksimalkan peluang.

Adapun dalam model analisis SWOT secara kuadran, dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 5.3 Model Kuadran Analisis Matriks SWOT

Berdasarkan Gambar Model Analisis Matriks SWOT di atas, maka rekomendasi strategi yang paling sesuai dengan peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial di Provinsi Jambi pada posisi kuadran 1, yaitu rekomendasi strategi progresif, yang artinya Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi merupakan suatu badan atau organisasi pemerintah yang memiliki kekuatan yang besar dan peluang yang tinggi dalam meningkatkan pajak potensial sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar tingkat pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga meraih kemajuan secara maksimal.

Matriks SWOT adalah matriks yang menginteraksikan faktor strategis internal dan eksternal. Tujuan dibuatnya matriks SWOT adalah untuk

mengumpulkan sebanyak mungkin tindakan-tindakan atau strategi yang memungkinkan untuk meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hasil analisis matriks SWOT dapat dilihat pada tabel 5.23 :

Tabel 5.23 Matrik Analisis SWOT

INTERNAL	EXTERNAL		
	<i>Identification of factors</i>	<i>Opportunities (O)</i>	<i>Threats (T)</i>
		1. Situasi Provinsi cukup aman terkendali. 2. Dukungan teknologi cukup memadai 3. Berkembangnya kerjasama antar organisasi pemerintah. 4. Himbauan legislatif dan eksekutif kepada masyarakat agar patuh pajak	1. Krisis ekonomi berkepanjangan. 2. Situasi wilayah yang belum kondusif. 3. Kesadaran atau pengetahuan wajib pajak. 4. Koordinasi antar instansi terkait kurang mantap
	<i>Strength (S)</i>	<i>S vs O</i>	<i>S vs T</i>
1. Adanya Peraturan Daerah & Perundang-undangan Pajak. 2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. 3. Ketersediaan SDM / Aparat pemungut pajak. 4. Struktur organisasi telah tersusun berdasarkan Peraturan Daerah	1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur 2. Peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. 3. Optimalisasi pemanfaatan sarana komputer 4. Koordinasi dengan tim intensifikasi pungutan pajak daerah provinsi terkait.	1. Peningkatan sosialisasi kebijaksanaan pajak kepada masyarakat 2. Koordinasi rapat terbatas dengan instansi terkait 3. Meningkatkan profesionalisme aparat di bidang teknis pelayanan	
<i>Weakness (W)</i>	<i>W vs O</i>	<i>W vs T</i>	
1. Kurangnya SDM / pemungut yang professional. 2. Kurang solidnya koordinasi instansi terkait. 3. Kurang akuratnya data kendaraan. 4. Kurangnya sarana pendukung operasional	1. Pengadaan diklat secara struktural/fungsional. 2. Membangun kesamaan persepsi dan komitmen antar instansi terkait. 3. Pemutakhiran data tiap triwulan 4. Penyempurnaan sarana pendukung	1. Penyempurnaan sistem pungutan pajak 2. Peningkatan kinerja operasional 3. Meningkatkan ketepatan/ kecepatan pelayanan 4. Sosialisasi informasi secara akurat kepada masyarakat	

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan analisis swot yang disajikan dalam tabel 5.23 diatas maka disusun strategi peningkatan pajak potensial adalah sebagai berikut :

1. Strategi *Strengths Opportunities* (SO)

Strategi ini berupaya untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mencapai peluang-peluang yang ada di luar atau lingkungan eksternal. Strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM atau aparatur, meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi pemanfaatan sarana komputer dan koordinasi dengan tim intensifikasi pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Strategi *Strengths Threats* (ST)

Strategi ini memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial yaitu dengan meningkatkan sosialisasi kebijaksanaan pajak kepada masyarakat atau wajib pajak, melakukan rapat terbatas dengan instansi terkait dan meningkatkan profesionalisme aparat dibidang teknis pelayanan.

3. Strategi *Weakness Opportunities* (WO)

Strategi ini dirancang dengan meminimalkan kelemahan dan berusaha memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang dapat di terapkan dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial yaitu dengan mengadakan diklat atau pelatihan secara struktural dan fungsional, membangun kesamaan persepsi

dan komitmen antar instansi terkait, pemutakhiran data setiap triwulan dan penyempurnaan sarana pendukung.

4. Strategi *Weakness Threats* (WT)

Strategi ini dirancang dengan meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi yang dapat dilakukan meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial yaitu dengan penyempurnaan sistem pemungutan pajak, peningkatan kinerja operasional, meningkatkan ketepatan atau kecepatan pelayanan dan sosialisasi informasi secara akurat kepada masyarakat.